

## **PERANAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENILAIAN PEMBELAJARAN SESUAI KURIKULUM 2013 DI SMK MA'ARIF 1 WATES KABUPATEN KULON PROGO**

### ***THE ROLE OF CIVIC EDUCATION TEACHERS IN THE ASSESSMENT OF LEARNING APPROPRIATE CURRICULUM OF 2013 IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL MA'ARIF 1 WATES DISTRICT KULON PROGO***

Oleh: Ajat Sudrajat Universitas Negeri Yogyakarta, [Azat.sudrajat28@gmail.com](mailto:Azat.sudrajat28@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan guru PPKn dalam penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013, kendala yang dihadapi guru PPKn dalam penilaian pembelajaran, dan upaya guru PPKn dalam mengatasi kendala dalam penilaian pembelajaran di SMK Ma'arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang guru PPKn yang mengajar di SMK Ma'arif 1 Wates. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik/metode. Teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, dimana tahapannya meliputi reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Peranan guru PPKn sebagai korektor dalam penilaian pembelajaran PPKn sesuai kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates sudah berjalan dengan baik. Sedangkan peranan guru sebagai motivator, inisiator, dan evaluator dalam penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates masih belum berjalan dengan baik. 2) Kendala yang dihadapi guru PPKn di SMK Ma'arif 1 Wates dalam penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 yaitu ada kendala internal dan juga eksternal, untuk kendala internal meliputi: faktor penguasaan teknologi, faktor usia, faktor keterbatasan penguasaan teknik penilaian pembelajaran. Kendala eksternal meliputi: faktor keterbatasan waktu, sarana prasarana penunjang belajar, dan peserta didik. 3) Upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penilaian pembelajaran PPKn sesuai kurikulum 2013 diantaranya: meminta bantuan orang lain atau peserta didik dalam mengoperasikan alat/media pembelajaran, pemberian motivasi terhadap diri sendiri, mempelajari kembali contoh-contoh teknik penilaian dari buku panduan guru dan mencontoh dari guru lainnya, pemberian tugas tambahan terstruktur dan tidak terstruktur, menggunakan metode pembelajaran kreatif yang dapat menggunakan media pembelajaran yang mudah untuk diperoleh, pemberian hadiah dan/atau penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di kelas dan aktif selama proses kegiatan pembelajaran, dan memilih metode serta teknik penilaian yang menyesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Kata kunci: *Peranan, Guru PPKn, Penilaian, Kurikulum 2013*

#### **Abstract**

*This research aims to describe the role of civic education teachers in the assessment of learning appropriate curriculum 2013, the obstacles faced by teachers of civic education teachers in the assessment of learning, and the efforts of civic education teachers to overcome the obstacles in the assessment of learning in Vocational High School Ma'arif 1 Wates District Kulon Progo. This Research is a descriptive study with qualitative approach. Subject determination conducted by purposive. The subject in this research are three Civic Education teachers who teach in Vocational High School Maarif 1 Wates. The data is collected by interview, observation, and documentation. Examination validity data technique is using triangulation method. Data analysis technique is using inductive data, where the steps involved reduction data, categorization data, presentation data, and conclusion. The result of this research are : 1) the role of civic education teachers as a proofreader in the assessment of learning appropriate curriculum of 2013 in Vocational High School Ma'arif 1 Wates is going well. Beside that, the role of the teacher as motivator, initiator and evaluator in the assessment of learning appropriate curriculum of 2013 in Vocational High School Ma'arif 1 Wates is still not going well. 2) the obstacles faced by teachers of civic education teachers in Vocational High School Ma'arif 1 Wates in the assessment of learning appropriate curriculum of 2013 were the internal and external obstacles. Internal obstacles include: mastery of technology factor, the age factor, they are lack of skill in learning assessment technique. External obstacles include: limited time factor, supporting infrastructure of learning, and students. 3) the efforts of civic education teachers to overcome the obstacles in the assessment of learning appropriate curriculum of 2013 include: asking for help from others*

or students for operating the tool / learning media, motivate themselves, relearn examples of assessment techniques form teacher guide books and the example of other teachers, structured additional task and unstructured additional task, using the creative learning method that is easy to understand, giving prizes and / or awards to students who excel in the classroom and active during learning activities, and choose the method as well as an assessment technique that adapts to conditions of students.

**Key Word: Role, Civic education teachers, Assessment, Curriculum of 2013**

## PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa disingkat PPKn merupakan mata pelajaran yang di amanatkan langsung Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mata pelajaran PPKn ini juga diharapkan mampu mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lampiran III Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014).

Sebagai mata pelajaran yang multidimensional, secara umum tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence*

and civic responsibility) (Lampiran III Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014).

Dalam pelaksanaannya di sekolah, mata pelajaran PPKn selalu dihadapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasan. Sunarso, dkk (2008: 2) menjelaskan beberapa kendala dan keterbatasan yang dihadapi mata pelajaran PPKn diantaranya (1) masukan instrumenal (*instrumenal input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar; (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Sehingga implementasi PPKn tidak sesuai dengan misi sebagaimana mestinya.

Ketidaksesuaian tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikasi empirik, yang salah satunya ada pada proses pembelajaran PPKn di kelas yang mencakup penilaian yang dilakukan oleh guru. Proses pembelajaran yang lebih banyak menekankan pada satu aspek akan berpengaruh juga terhadap penilaian yang dilakukan guru di kelas. Hal serupa juga di sampaikan oleh Sunarso, dkk (2008: 2) terkait indikasi empirik yang menunjukkan implementasi mata pelajaran PPKn yang salah arah:

*Pertama*, proses pembelajaran dan penilaian dalam PPKn lebih ditekankan pada dampak instruksional (*instructional effect*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya ditekankan pada dimensi kognitif saja, pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik melalui pelibatangannya secara proaktif dan interaktif, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra atau ekstrakurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku peserta didik. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “*hands-on experience*” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi-indikasi di atas menunjukkan bahwa begitu banyak kendala bagi PPKn untuk mencapai hasil belajar yang secara utuh mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Apabila hasil belajar belum bisa mencapai ke tahap dimana semua dimensi kewarganegaraan dalam mata pelajaran PPKn dapat tercapai maka dapat diartikan pula tujuan

dari PPKn sendiri belum sepenuhnya dapat dicapai.

Menyadari akan hal itu tentunya pemerintah juga terus berupaya memperbaiki sistem yang ada dalam pendidikan. Salah satunya adalah perubahan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dimulai pada tahun 2013 lalu pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yakni kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum yang sebelumnya yakni kurikulum 2006. Salah satu aspek yang dijadikan perubahan dan penataan di dalam implementasi kurikulum 2013 adalah pada penataan standar penilaian. Meskipun telah ada kurikulum 2013 tidak berarti semua sekolah serempak untuk menerapkannya, hanya beberapa sekolah yang dipilih sebagai sekolah pecontohan untuk implementasi kurikulum 2013. Berbagai faktor menjadi alasan untuk tidak diberlakukannya kurikulum 2013 di semua sekolah.

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai kurikulum yang mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; merancang sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat

sebagai sumber belajar (Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013).

Melihat karakteristik kurikulum 2013 yang demikian sangat sesuai dengan tujuan umum dari mata pelajaran PPKn yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran di kelas, apabila dalam hal ini guru mampu melaksanakan kurikulum 2013 di sekolah dengan baik, pada dasarnya inti dari implementasi kurikulum itu sendiri adalah pembelajaran dimana salah satunya mencakup penilaian. Penilaian merupakan aspek penting dalam pembelajaran dan tidak dapat terlepas dari pembelajaran. Pada intinya kesuksesan pendidikan bukan terletak pada kurikulum melainkan dari gurunya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan kunci kesuksesan pendidikan bukan terletak pada kurikulum, melainkan pada gurunya. (Yohannie Lingasari, CNN Indonesia Kamis, 18/12/2014 15:35 WIB).

Penilaian sebagai salah satu aspek penting dalam pembelajaran adalah sebagai alat bukan sebagai tujuan. Maksud dari penilaian sebagai alat disini merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah peserta didik telah mencapai hasil belajar yang diharapkan serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan perbaikan

(Majid, 2014: 35-36). Seperti yang telah disampaikan di awal, yang menjadi perubahan dan penataan dalam implementasi kurikulum 2013 ada pada penataan standar penilaian. Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyebutkan bahwa Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada hakikatnya penataan penilaian tersebut tetap terpusat pada pembelajaran, karena pembelajaran merupakan inti dari implementasi kurikulum.

Di dalam kurikulum 2013 tentang penilaian pembelajaran telah diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik dengan meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam penilaian autentik peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata (Kunandar, 2015: 36). Penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013 tidak hanya terfokus pada satu ranah penilaian pengetahuan saja, akan tetapi selain penilaian pengetahuan dalam hal ini guru juga melaksanakan penilaian dalam ranah sikap dan juga keterampilan.

Penilaian dalam mata pelajaran PPKn mencakup tiga aspek sekaligus. *Pertama*, kompetensi sikap yang dalam kurikulum 2013 dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. *Kedua*, kompetensi pengetahuan merupakan kompetensi ranah kognitif dalam taksonomi pendidikan. Gradasi pencapaian kompetensi pengetahuan

PPKn pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Tahapan ini perlu dipahami guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam menyusun kisi-kisi penilaian. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan. *Ketiga*, kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Gradasi pencapaian kompetensi keterampilan mata pelajaran PPKn pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK adalah mencoba dan menyajikan. Tahapan ini perlu dipahami oleh guru untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam kisi-kisi penilaian. Teknik penilaian kompetensi keterampilan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik (Lampiran III Permendikbud Nomor 60 tahun 2014).

Penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut tentunya memiliki tujuan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, seperti yang telah tercantum dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 diantaranya untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi; menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi; menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan memperbaiki proses pembelajaran.

Di sekolah peranan guru dalam melaksanakan penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013 masih kurang, seperti yang terjadi di sekolah percontohan Kurikulum 2013 tingkat SMP, yakni di SMP Negeri Se-Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan keterangan dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh Marttyas Dwi Jatmiko pada September 2015 lalu, dengan judul “Implementasi Penilaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Se-Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul”, terkait implementasi penilaian pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kecamatan Playen tersebut belum terlaksana dengan baik, penilaian yang sudah terlaksana di kelas belum semuanya. Baru aspek pengetahuan dan aspek keterampilan saja yang terlaksana dengan baik, menggunakan teknik dan instrumen yang baik. Sedangkan untuk penilaian aspek sikap, guru belum bisa melaksanakan dengan baik karena masih menemui hambatan-hambatan yang antara lain kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang diikuti guru tentang kurikulum 2013, pemahaman guru tentang teknis pelaksanaan penilaian sangat kurang, serta alokasi waktu untuk melakukan penilaian pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung dirasa masih kurang.

Wilayah lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta yakni Kabupaten Kulon Progo

sebagian besar guru-guru mengaku belum siap untuk menerapkan kurikulum 2013, mereka beralasan pelatihan kurikulum masih terbatas, sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kulon Progo Sumarsana, menuturkan bahwa kurikulum 2013 akan diterapkan di 25% dari total sekolah yang ada di Kulon Progo pada tahun ajaran 2016/2017. (Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2016/02/16/65/1313320/guru-kulon-progo-belum-siap-terapkan-kurikulum-2013> Pada tanggal 29/02/2016, jam 12.56 WIB).

Selain di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama, di tingkat pendidikan menengah atas dan kejuruan juga diberlakukan kurikulum 2013. Pada dasarnya untuk SMA/MA dengan SMK/MAK adalah sama yakni tingkat pendidikan menengah atas, akan tetapi ada perbedaan diantara keduanya, dimana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang lebih mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu/pengembangan keahlian tertentu. Pengakomodasian minat peserta didik menjadi pembeda antara SMA/MA dengan SMK/MAK, selain itu beban belajar per minggu juga berbeda, dimana SMK/MAK memiliki beban belajar per minggu lebih banyak 4 (empat) sampai 6 (enam) jam per minggu.

Melihat sekilas tentang SMA/MA dengan SMK/MAK, tentu untuk tingkat

pendidikannya sama yakni pendidikan menengah atas, akan tetapi di tinjau lebih dalam lagi keduanya memiliki perbedaan yang jelas, dimana SMK/MAK merupakan jenjang pendidikan yang lebih mengutamakan kepada pengembangan bidang keahlian tertentu, dapat dikatakan bahwa SMK/MAK dalam pembelajarannya lebih menonjolkan aspek keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya yang disiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Sudira (2006: 9-10) dalam bukunya menyebutkan bahwa pembelajaran di SMK dilaksanakan dalam kerangka pembentukan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) peserta didik, pembelajaran di SMK menggunakan paradigma *outcome* yaitu kompetensi apa yang harus dikuasai peserta didik bukan pembelajaran yang memaksakan apa yang harus diajarkan oleh seorang guru. Hal ini dapat dilihat dari tujuan SMK/MAK sendiri yang tertuang dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 tujuan SMK/MAK adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Seperti yang telah di sebutkan bahwa di tingkat pendidikan menengah khususnya SMK/MAK juga di berlakukan kurikulum 2013, di Kabupaten Kulon Progo sendiri sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya terdapat 1

SMK swasta yang sejak awal ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat untuk memberlakukan kurikulum 2013, yakni SMK Ma'arif 1 Wates melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/H/KR/2015. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah swasta yang menerapkan kurikulum 2013 di Kulon Progo, sementara sekolah-sekolah swasta khususnya Sekolah Menengah Kejuruan terbilang banyak di kabupaten Kulon Progo, akan tetapi hanya sekolah SMK Ma'arif 1 Wates saja yang dijadikan sekolah percontohan penerapan kurikulum 2013 sejak awal.

Dalam implementasi kurikulum 2013 khususnya dalam aspek penilaian pembelajaran, sekolah percontohan penerapan kurikulum 2013 seperti halnya SMK Ma'arif 1 Wates berpedoman pada Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, serta pada buku guru yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah sebagai buku panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Akan tetapi menurut informasi sementara yang di dapatkan langsung dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum, di SMK Ma'arif 1 Wates pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn

dalam satu kali pertemuan di kelas disinyalir belum mencakup semua aspek yang ada pada mata pelajaran PPKn yang sesuai dengan kurikulum 2013.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Zuriyah (2007: 47) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong (2005: 4) *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penilaian Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 di SMK Ma’arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo” dilaksanakan di SMK Ma’arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2016.

### **Subjek Penelitian**

Pemilihan subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2014: 299) teknik *purposive*

adalah memilih subjek penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini diantaranya: (1) Satu orang guru PPKn yang mengajar di kelas X (sepuluh) SMK Ma’arif 1 Wates. (2) Satu orang guru PPKn yang mengajar di kelas XI (sebelas) SMK Ma’arif 1 Wates. (3) Satu orang guru PPKn yang mengajar di kelas XII (dua belas) SMK Ma’arif 1 Wates.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada tiga, yaitu *pertama* wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, dimana dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing (Zuriyah, 2007: 179).

Wawancara ada beberapa macam, seperti yang disampaikan Esterberg yang dikutip Sugiyono (2014: 317-318) beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

*Kedua* observasi, menurut S. Margono (1997) yang dikutip Zuriyah (2007: 173) mengatakan bahwa observasi diartikan sebagai

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. *Ketiga* dokumentasi, menurut Arikunto (2002: 231) metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Maka dari itu peneliti hendak menggunakan teknik dokumentasi ini untuk didapatkan data-data yang lengkap terkait dengan penelitian yang dilakukan.

### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi teknik/metode*. Menurut Patton dalam Moleong (2005: 331) dalam triangulasi teknik atau metode ini terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Maka triangulasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengecek ulang derajat kepercayaan data dengan teknik pengambilan data yang berbeda-beda, yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif, dengan kata lain penarikan kesimpulan

berawal dari fakta dan peristiwa kongkrit dengan penarikan kesimpulan secara umum dengan menyajikan data serta analisis data dalam bentuk deskriptif. Langkah-langkah analisis data induktif dalam penelitian ini antara lain: reduksi data, kategorisasi data, penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penilaian Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates**

#### **1. Sebagai Korektor**

Guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates dalam menerapkan peranannya sebagai korektor dalam penilaian pembelajaran sudah berjalan baik, seperti menegur ataupun mengingatkan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan atau berperilaku yang kurang baik ketika di dalam kelas. Dalam memberikan teguran dan peringatan terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan lumayan berat, guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates juga sangat mempertimbangkan dampak yang akan diterima dari teguran ataupun peringatan terhadap sisi psikologis peserta didik.

Selain mengoreksi kesalahan peserta didik dalam tingkah lakunya, guru-guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates

juga mengoreksi hasil belajar peserta didik. Selain memberitahukan hasil belajar peserta didik yang belum mencapai KKM, guru juga mengoreksi kekurangan yang menjadi sebab peserta didik memperoleh hasil belajar yang belum optimal.

## 2. Sebagai Motivator

Pemberian motivasi yang dilakukan oleh guru PPKn di SMK Ma'arif 1 Wates dalam upaya meningkatkan kualitas belajar peserta didik di kelas belum berjalan dengan baik. Motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran PPKn masih rendah, sehingga berdampak pada penilaian yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik. Motivasi belajar peserta didik yang rendah menyebabkan kondisi di dalam kelas tidak kondusif untuk belajar, sehingga guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates mengalami kesulitan untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan yang direncanakan. Tidak hanya penilaian pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan juga tidak dapat terlaksana sesuai rencana.

## 3. Sebagai Inisiator

Sebagai inisiator guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates belum mampu mencetuskan ide-ide untuk

mengembangkan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang dilaksanakan. Teknik penilaian yang digunakan oleh guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Ketika tahun ajaran baru datang, teknik dan instrumen penilaian yang digunakan adalah dari tahun ajaran sebelumnya baik itu teknik penilaian aspek sikap, maupun teknik penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan.

## 4. Sebagai Evaluator

Sebagai evaluator guru PPKn dituntut untuk dapat memainkan peranannya, tidak hanya menilai hasil pembelajaran tapi juga menilai proses jalannya pembelajaran di kelas. Dalam peranannya sebagai evaluator dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum 2013, guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates belum dapat memainkan peranannya dengan baik. Dalam menilai hasil pembelajaran seperti ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester sudah dapat dilaksanakan dengan baik, sementara dalam menilai proses pembelajaran masih ada penilaian yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Dalam melaksanakan penilaian pembelajaran untuk aspek pengetahuan salah satunya, input nilai yang dilakukan guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates hanya menggunakan nilai dari hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, sedangkan hasil penilaian proses pembelajaran tidak digunakan.

## **B. Kendala Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penilaian Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates**

Peranan guru PPKn SMK Ma'arif 1 wates dalam melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 menemui beberapa kendala, diantaranya:

### **1. Kendala Internal**

Kendala internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang muncul dari guru PPKn sendiri, dalam arti kendala yang dihadapi guru PPKn ketika melaksanakan peranannya dalam penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates datang dari guru PPKn sendiri.

a. Faktor penguasaan teknologi, selain disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana yang disediakan sekolah, guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates juga kurang menguasai teknologi yang sudah berkembang, sehingga

berakibat pada penggunaan media pembelajaran yang terbatas.

b. Faktor usia juga menjadi hambatan bagi guru SMK Ma'arif 1 Wates dalam mengembangkan proses pembelajaran secara optimal, dimana keduanya adalah guru-guru senior yang usianya rata-rata 50 tahun. Faktor usia ini berakibat pada semangat guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates yang kurang dalam meningkatkan kreatifitas mengajar, sehingga tidak mampu mendorong semangat dan juga kreatifitas peserta didik dalam belajar.

c. Keterbatasan pada penguasaan teknik penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.

### **2. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal merupakan kendala yang dihadapi guru PPKn ketika melaksanakan peranannya dalam penilaian pembelajaran PPKn sesuai kurikulum 2013 yang datang dari luar guru PPKn itu sendiri. Adapun kendala eksternal yang sering dihadapi guru PPKn dalam melakukan peranannya dalam penilaian pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates antara lain:

a. Keterbatasan waktu, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran

PPKn tidak seimbang dengan materi PPKn yang begitu banyak. Waktu yang singkat, materi yang banyak, dan target pencapaian yang tidak hanya dari segi pengetahuan saja tapi aspek sikap dan keterampilan juga menjadi target capaian yang harus terlaksana dalam kurikulum 2013, menjadikan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran secara optimal, target pencapaian ketiga aspek tadi pun sulit terwujudkan.

- b. Sarana prasarana sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran yang tersedia di SMK Ma'arif 1 Wates kurang mendukung untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, kondisi ini berakibat pada keterbatasan metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn, sehingga metode pembelajaran yang lebih banyak digunakan oleh guru adalah metode ceramah, dan media pembelajaran yang lebih banyak digunakan adalah buku teks pelajaran atau buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Keadaan seperti ini berakibat pada ketertarikan peserta didik pada pembelajaran PPKn berkurang.

- c. Latar belakang peserta didik di SMK Ma'arif 1 Wates yang beranekaragam, ketertarikan peserta didik terhadap materi pelajaran PPKn, dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami materi yang disampaikan guru perlu mendapat perhatian lebih. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates dalam peranannya terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn yang sesuai dengan kurikulum 2013. Tingkat dan kemauan peserta didik yang berbeda menjadikan ada beberapa peserta didik yang antusias dalam mengikuti pembelajaran PPKn tetapi ada beberapa peserta didik yang kurang antusias dan hanya sekedar hadir di kelas tanpa adanya partisipasi aktif dalam belajar.

### **C. Upaya Guru PPKn dalam Mengatasi Kendala dalam Penilaian Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates**

Beberapa upaya yang dilakukan guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penilaian pembelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum 2013 antara lain:

1. Meminta bantuan orang lain/peserta didik dalam mengoperasikan alat/media

pembelajaran seperti LCD Proyektor untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi.

2. Pemberian motivasi untuk diri sendiri berupa melaksanakan komitmen mereka sendiri sebagai seorang guru dalam pengabdian di sekolah.
3. Mempelajari kembali pedoman penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013 dari buku panduan guru yang resmi dikeluarkan oleh Kemendikbud. Selain itu guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates juga mencontoh dari guru lainnya terkait dengan teknik penilaian berikut instrumennya yang belum mereka pahami sebelumnya.
4. pemberian tugas tambahan rerstruktur dan tugas tidak terstruktur.
5. Penggunaan metode pembelajaran yang kreatif.
6. Pemberian hadiah dan/atau penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di kelas dan aktif selama proses kegiatan pembelajaran.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Peranan guru PPKn dalam penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 di

SMK Ma'arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo yaitu sebagai korektor, motivator, inisiator dan evaluator dalam penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo.

2. Kendala guru PPKn dalam penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates, meliputi kendala internal dan eksternal. kendala internal yang dihadapi guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates diantaranya ada faktor keterbatasan dalam penguasaan teknologi, faktor usia, dan faktor keterbatasan penguasaan teknik penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Sedangkan untuk kendala eksternal yang dihadapi guru PPKn SMK Ma'arif 1 Wates diantaranya keterbatasan waktu, sarana prasarana penunjang proses pembelajaran, dan peserta didik.
3. Upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penilaian pembelajaran PPKn sesuai kurikulum 2013 diantaranya meminta bantuan orang lain atau peserta didik dalam mengoperasikan alat/media pembelajaran, pemberian motivasi terhadap diri sendiri, mempelajari kembali contoh-contoh teknik penilaian dari buku panduan guru dan mencontoh dari guru lainnya, pemberian tugas tambahan terstruktur dan tidak terstruktur, menggunakan metode

pembelajaran kreatif yang dapat menggunakan media pembelajaran yang mudah untuk diperoleh, pemberian hadiah dan/atau penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di kelas dan aktif selama proses kegiatan pembelajaran, dan memilih metode serta teknik penilaian yang menyesuaikan dengan kondisi peserta didik.

### **Saran**

Mengacu pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian mengenai Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penilaian Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo, serta berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian, terdapat beberapa saran yang disampaikan peneliti antara lain:

1. Berkaitan dengan input nilai aspek pengetahuan peserta didik yang hanya mengambil dari hasil ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester seharusnya guru melakukan input nilai juga mengambil dari hasil penilaian proses pembelajaran yang telah dilakukan agar sesuai dengan kurikulum 2013 yang sedang diberlakukan.
2. Kondisi peserta didik yang sulit dikendalikan hingga berdampak pada proses pembelajaran di kelas tidak kondusif seharusnya pihak guru melakukan pendekatan lebih dalam lagi dengan peserta

didik untuk menggagas hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik dan memberikan motivasi kepada peserta didik.

Keberadaan fasilitas yang disediakan sekolah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran yang belum memadai hendaknya dilengkapi, sehingga dapat menunjang kebutuhan yang diperlukan oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

### **Daftar Pustaka**

- Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Sunarso, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.
- Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
- Yohannie Linggasari, CNN Indonesia Kamis, 18/12/2014 15:35 WIB  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218152044-20-19113/menteri-anies-kunci-sukses-pendidikan-bukan-di-kurikulum/> Diakses pada tanggal 24/05/2016, jam 10.30 WIB.
- Majid, Abdul. 2014. *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kunandar. 2015. *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dwi Jatmiko, Marttyas. 2015. *Implementasi Penilaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Se-Kecamatan Plaen Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Admin, Okezone Selasa, 16 Februari 2016 - 15:02 WIB  
<http://news.okezone.com/read/2016/02/16/65/1313320/guru-kulon-progo-belum-siap-terapkan-kurikulum-2013> Diakses pada tanggal 29/02/2016, jam 12.56 WIB.

Sudira, Putu. 2006. *Pembelajaran di SMK*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Subdit Pembelajaran.

Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 022/H/KR/2015 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

Judul : Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penilaian Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 di SMK Ma'arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo,  
Nama : Ajat Sudrajat  
NIM : 12401241016  
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Yogyakarta, ... Maret 2017

Reviewer

Pembimbing



Dr. Mukhamad Mardiono, M.Pd.  
NIP. 197806302003121002



Anang Priyanto, M.Hum.  
NIP. 19580910 198503 1 003